



# **KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA PRODUK KEBIJAKAN REZIM ORDE BARU**

## **PIDATO PENGUKUHAN**

Disajikan pada Upacara  
Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya  
dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang, 12 Oktober 1999

Oleh :

**I. S. Susanto**

Assalam'ualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat, :

Saudara Rektor/Ketua Senat dan seluruh Anggota Senat  
Universitas Diponegoro,  
Hadirin yang saya muliakan;

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap di Universitas Diponegoro.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pidato pengukuhan yang berjudul “Kejahatan Korporasi di Indonesia sebagai Produk Kebijakan Rezim Orde Baru”, merupakan hasil pengamatan, perenungan dan pemahaman terhadap fenomena kejahatan dalam tataran empirik, realitas, *konsep*, teori, pengetahuan dan pandangan-pandangan yang *hidup* tentang kejahatan pada umumnya, khususnya terhadap kejahatan korporasi di tanah air.

Hadirin yang saya muliakan,

Krisis moneter yang melanda tanah air tahun 1997 yang lalu, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, hukum,

budaya, dan akhirnya terakumulasi menjadi **krisis kepercayaan** hampir di segala aspek kehidupan.

Bila dicermati, mega krisis tersebut merupakan buah *kebijakan* yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pelaku bisnis (baca: korporasi), birokrasi serta elit penguasa.<sup>1)</sup> Akibatnya masih kita rasakan hingga kini khususnya bagi rakyat banyak. Terhadap perilaku atau fenomena yang merugikan dan *merusak* kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini agaknya tidak ada sebutan yang lebih tepat yakni sebagai **kejahatan** --dalam konteks pembicaraan ini : **kejahatan korporasi**.<sup>1.a)</sup>

Meski pandangan tentang korporasi sebagai subjek kejahatan belum populer dan dipandang “baru”. dalam arti baik sebagai pelaku maupun pertanggungjawabannya secara pidana,<sup>2)</sup> namun sebagai subjek hukum, sebagai pelaku bisnis sebenarnya sudah dikenal beberapa abad yang lampau. Barangkali V.O.C. yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi modern di bidang bisnis yang dibangun dengan modal tetap yang berupa saham.<sup>3)</sup> Melalui berbagai peraturan perundangan, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan *sama* dengan subjek hukum alamiah yakni **manusia**. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh pengundang-undang menjadikan ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawabannya ditentukan oleh hukum. Kesulitan muncul antara lain karena *kurangnya*

visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasi di samping kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri, bukan saja bagi masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi dan karenanya juga dalam mempertanggungjawabkannya. Misalnya terhadap produk korporasi yang menyebabkan orang sakit atau mati. Karena *indakan* korporasi tersebut harus dievaluasi oleh lembaga peradilan, maka penanganannya menjadi kompleks dan bersifat sangat teknis jika dibandingkan dengan kaiauu perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia (alamiah).

Sehubungan dengan besarnya peranan korporasi dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peluang dan kelonggaran yang diberikan melalui peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang berbau KKN.<sup>4)</sup> Kebijakan pembangunan Orde baru yang mengutamakan *pertumbuhan ekonomi*<sup>5)</sup> telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa dan konglomerasi<sup>6)</sup> yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia.<sup>7)</sup> Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat di bidang ekonomi pada tahap berikutnya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi lainnya: terhadap konsumen antara lain melalui penentuan struktur harga; terhadap buruh melalui kebijakan terhadap *pengurangan* hak-hak pekerja seperti di bidang pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, PHK; terhadap lingkungan seperti penguasaan, penggunaan, pengurusan dan perusakan sumber daya alam serta

pencemaran lingkungan; terhadap sesama pelaku ekonomi menjadikan tidak berkembangnya persaingan secara jujur ; perannya dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik yang cenderung berpihak kepada korporasi ketimbang kepada kepentingan publik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat luas.

Kebijakan-kebijakan tersebut oleh pemerintahan Orde Baru dilakukan melalui peraturan perundangan dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan lainnya di hampir segala kegiatan bisnis seperti di bidang perbankan, otomotif (Mobnas), kehutanan, jalan tol, pertambangan, dan sebagainya.<sup>8</sup> namun dalam hal ini hukum cenderung digunakan sekedar sebagai alat legitimasi sehingga hanya bersifat formal belaka.

### **Perilaku Jahat**

Sebagaimana diutarakan, kebijakan pemerintahan Orde Baru telah menjadikan korporasi-korporasi raksasa semakin besar pengaruhnya di hampir segala aspek kehidupan, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita santap, pakaian yang kita kenakan, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita gunakan,



berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku seksual kitapun,<sup>8 a)</sup> semuanya berbau korporasi, baik melalui produknya maupun pencemaran yang ditimbulkannya.

Meski 60 tahun yang lalu karya Sutherland yang monumental tentang *white-collar criminality* (baca: kejahatan korporasi) sudah dilontarkan,<sup>9)</sup> namun baru akhir 1960-an penelitian terhadap kejahatan korporasi menarik perhatian para ilmuwan. Di Indonesia pembicaraan tentang kejahatan korporasi baru merebak pada dasawarsa penutup abad 20.<sup>10)</sup>

Meskipun penelitian empirik terhadap kejahatan korporasi di Indonesia masih sangat langka,<sup>11)</sup> namun dari berita-berita di media massa menggambarkan berbagai perilaku korporasi yang merugikan dan membahayakan masyarakat dan kehidupan yang luar biasa besarnya. Besaran dan keluasan kejahatan korporasi ini semakin nampak dan menjadi *terbuka* dengan terjadinya krisis yang melanda negara kita sejak pertengahan tahun 1997 seperti di bidang perbankan, pertambangan, kehutanan, pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup, konstruksi, dan manipulasi di bidang perpajakan, "*mark up*" terhadap nilai proyek, nilai aset dan sebagainya.<sup>12)</sup> Kasus *marked up* terhadap nilai proyek yang terjadi di republik ini luar biasa besarnya dan bukan hanya pada proyek-proyek yang ditangani oleh Keluarga Cendana seperti pada pembangunan Kilang Balongan oleh perusahaan Bambang Trihatmodjo yang diperkirakan terjadi "pembengkakan" nilai proyek sebesar US \$ 1 miliar akan tetapi pada proyek-proyek yang non

keluarga Cendana pun juga banyak terjadi, sehingga kalau mau membongkar kejahatan korporasi yang satu ini jangan-jangan seluruh republik ini harus dibongkar habis.<sup>12.a)</sup> Dari kasus-kasus tersebut terdapat indikasi yang sangat menonjol bahwa berlangsungnya kejahatan korporasi selama ini terutama karena adanya keterlibatan birokrasi (pemerintah) baik secara kelembagaan maupun oleh aparat birokrasi.<sup>13)</sup>

Keterlibatan birokrasi tersebut dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang memberi peluang korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun dalam *membiarkan* dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat.<sup>14)</sup> Setiap kali kita menyaksikan tindakan-tindakan korporasi yang melanggar hukum dan yang merugikan rakyat banyak hampir selalu tidak tersentuh oleh hukum. Kalaupun sempat mencuat ke permukaan maka berbagai cara dilakukan seperti *membantah*, *mengklarifikasi*, *menutupi*, *kurang bukti* atau seakan-akan mengambil tindakan namun tidak ada kelanjutannya. Nampaknya alasan utama yang sering kita dengar adalah karena “belum ada undang-undang atau peraturan”, meski bisa dipertanyakan : mengapa tidak dibuat undang-undang atau peraturan? Hal ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru hukum cenderung dipakai sebagai alat legitimasi dan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya penguasa dan kroni-kroninya.

Nampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paradigma kekuasaan oleh pemerintahan Orde Baru. sehingga ada

anggapan bahwa penguasa/pemerintah selalu benar.<sup>14 a)</sup> Akibatnya masalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan pemerintah/penguasa hampir *tidak dikenal* dalam pemerintahan Orde Baru dan walaupun dilakukan hanyalah bersifat formalitas belaka sehingga tidak pernah menyentuh substansinya, yang sebenarnya merupakan akar kebenaran dan karenanya juga merupakan persoalan moralitas dari suatu tindakan. Pendekatan kekuasaan tersebut menjadikan perbedaan pandangan dan konflik yang timbul tidak diakui keberadaannya dan diselesaikan melalui **paksaan**. Penyelesaian dengan paksaan jelas **meninggalkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai demokratis, tidak rasional, tidak bermoral dan tidak etis**.

Hadirin yang saya muliakan ;

Secara garis besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi meliputi :

(a) kerugian di bidang ekonomi/materi

Meski sulit untuk mengukur “secara tepat” jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, terutama karena tidak adanya badan yang secara khusus bertugas mencatat kejahatan korporasi –berbeda dengan kejahatan *warungan* yaitu kepolisian– namun berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya. khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian, penipuan. Misalnya



“perampokan” bank yang dilakukan oleh Eddy Tansil (baca: korporasi) senilai 1,3 triliun rupiah luar biasa besarnya jika dibandingkan dengan perampokan yang cukup menghebohkan yang dilakukan oleh komplotan Slamet Gundul beberapa tahun silam, yang hanya sekitar seratus sampai 200 juta rupiah saja. Dengan terbukanya *kebusukan* korporasi, terungkap bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan mencapai ratusan triliun rupiah di berbagai bidang seperti perbankan, berbagai industri dan pencemaran serta menderitakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak balita.<sup>14.51</sup>

(b) kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Pembicaraan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi umumnya ditujukan pada kerugian di bidang ekonomi, sedangkan kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa pada kenyataannya juga sangat serius. Menurut Geis misalnya, setiap tahunnya korporasi bertanggung jawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia.

Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi. Meskipun di Indonesia studi terhadap hal ini belum dilakukan, namun studi di Amerika bisa

digunakan untuk menunjukkan betapa besarnya **kerugian yang ditimbulkan** oleh kejahatan korporasi. Dengan membandingkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi terhadap buruh (mereka yang bekerja pada korporasi) dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan melalui data statistik kriminal yang dibuat oleh F.B.I. dan data dari *The President's Report on Occupational Safety and Health* tahun 1973, Reiman menyimpulkan bahwa kematian maupun kerugian fisik yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi luar biasa besarnya dibandingkan dengan kejahatan warungan, yaitu 100 000 dibandingkan dengan 9.235 untuk kematian dan 390.000 berbanding dengan 218.385 untuk kerugian fisik. Sementara dalam hubungannya dengan besarnya *ancaman kejahatan* yang dibuat oleh F.B.I. melalui *gambaran crime of clocks*, bahwasannya *crime of clocks* bagi pembunuhan terjadi setiap 26 menit pada tahun 1974 bila dibandingkan dengan kematian yang terjadi di bidang industri adalah setiap 4,5 menit. Lebih lanjut dinyatakan oleh Reiman "*In other words, in the time it takes for one murder on the crime clock, six workers have died*" just from trying to make a 'living'".<sup>15)</sup> Kematian atau *cacat* yang diakibatkan oleh industri ini bukanlah karena kecelakaan di tempat kerja semata, akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh "penyakit" yang pada umumnya karena kondisi-kondisi di luar "kontrol" pekerja, seperti kadar *coal dust* (yang menyebabkan sakit *black lung*) atau *debu tekstil* (yang

menyebabkan *byssinosis* atau *brown lung*) atau serat asbestos (yang dapat menyebabkan kanker) atau tar arang (*coal tars*) yang menyebabkan kanker paru-paru).<sup>16)</sup>

Barangkali kasus kejahatan korporasi di Indonesia yang pernah mencuat ke permukaan adalah kasus biskuit beracun pada tahun 1989 yang mengakibatkan sekitar 13 orang meninggal.<sup>17)</sup> Berbagai kasus pencemaran antara lain pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang menimbulkan gangguan pernafasan hingga sampai ke negara tetangga,<sup>18)</sup> nampaknya tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukumnya. Salah satu produk kebijakan rezim Orde Baru adalah digunakannya briket batu bara -- sudah diterapkan diperumahan tipe RS dan RSS-- atas anjuran Presiden Soeharto. Berdasarkan penelitian briket batu bara membahayakan kesehatan hingga menimbulkan kanker paru-paru. Faktor yang membahayakan dalam penggunaan briket batu bara di rumah tangga adalah emisi zat terbang (*volatile matter*) yang mengandung tar. Kadar zat terbang yang disyaratkan sebesar 14 % yang merupakan batas optimal pengapian dan peredaman emisi zat terbang. Namun hasil penelitian menunjukkan briket batu bara yang diproduksi di dalam negeri kadar volatilnya masih 29 %.<sup>19)</sup>

(c) kerugian di bidang sosial dan moral

Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi

adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis, seperti pernyataan dari *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi karena akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam “struktur bisnis yang sah” (*the structure of legitimate business*).<sup>20)</sup>

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menggambarkan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, seperti pelanggaran terhadap ketentuan tentang batas maksimal pemberian kredit bagi kelompok usaha di bidang perbankan,<sup>20 a)</sup> pencemaran, iklan yang menyesatkan, dan *mark up* merupakan bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari. Sehingga kejahatan korporasi di republik ini sudah merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi.<sup>20 b)</sup> Bentuk kejahatan korporasi yang lain adalah pemberian suap dan korupsi yang dilakukan terutama oleh korporasi-korporasi besar yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak karena kesenjangan yang ditimbulkannya. Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah)



dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan korporasi untuk “melawan” kepentingan publik. Dengan demikian setiap tindakan korupsi politik akan menghasilkan kerusakan politik dan memperburuk pilihan sosial yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang korup, akibatnya orang-orang yang memiliki prinsip kuat akan memasuki dunia politik yang menjijikkan.<sup>20.c)</sup>

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang nilai-nilai sosial lainnya adalah merusakkan nilai-nilai demokrasi dan karenanya menghambat proses demokrasi.<sup>20.d)</sup> Kolusi antara korporasi dan pejabat pemerintahan dilakukan secara tertutup dan karenanya diupayakan untuk tidak transparan, sementara keterbukaan (transparansi) merupakan hal yang penting bagi demokratisasi. Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan “minat” (*interesse*) para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi terhadap masyarakat dan manipulasi terhadap pemerintah dalam usaha mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Hal ini punya pengaruh (1) cenderung memiskinkan orang miskin –seolah-olah berbuat “amal” kepada penguasa atas beban masyarakat (konsumen) dan (2) cenderung membuat pemerintah korup.<sup>20.e)</sup>

Dengan semakin mengglobalnya ekonomi, maka tindakan suap yang dilakukan oleh korporasi transnasional merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat negara-negara ketiga seperti Indonesia.<sup>20.f)</sup>



Keadaan yang demikian membawa Braithwaite pada kesimpulan berikut :

*“Transnational corporate corruption is therefore perhaps the most pernicious form of crime in the world today because it involves robbing the poor to feed the rich, and brings into political power rulers and administrators who in general will put self-interest ahead of the public interest, and transnational corporation interest ahead of national interest”.*<sup>21)</sup>

Melihat jangkauan kejahatan korporasi yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi, nampaknya masalah suap dan pemberian “uang pelicin” merupakan salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi. Menurut Chambliss, apa yang disebut sebagai uang pelicin itu terjadi di mana saja di seluruh dunia; bahwa penjualan-penjualan yang dilakukan baik kepada pemerintah, perusahaan besar dan kecil, maupun kepada pedagang eceran, pada dasarnya sama, yaitu orang-orang yang memberikan perintah atau order besar mengharap dan menerima uang sogokan atau uang pelicin. Dia menyimpulkan bahwa ada kecenderungan yang melekat pada dunia usaha, penegak hukum dan dunia politik (termasuk pemerintah) untuk “melakukan kejahatan” secara sistematis. Hal ini bukan karena di lapangan tersebut terlalu banyak undang-undang, tetapi lebih disebabkan karena **kejahatan merupakan bisnis yang menguntungkan dan efisien.**<sup>22)</sup>

## Peran Hukum

Melihat maraknya kejahatan korporasi di republik ini, salah satu masalah utamanya adalah **hukum**, baik sebagai **pranata** atau peraturan perundangan maupun sebagai **lembaga** dalam arti organisasi penegak hukum dan bekerjanya organisasi penegak hukum (birokrasi penegak hukum). Selama pemerintahan Orde baru hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Dengan kata lain hukum telah *terkooptasi* oleh dan *membudak* kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.

Dominasi pemerintah terhadap pembuatan pranata nampak pada *arah* peraturan yang cenderung melindungi dan menguntungkan pemerintah dan elit tertentu di hampir segala aktivitas bisnis. Salah satunya adalah pada Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang cenderung kurang memberikan perlindungan kepada nasabah *kebanyakan*, sementara ketentuan tentang “rahasia bank” cenderung digunakan untuk melindungi pihak bank dan pemerintah/pengawas, sehingga penguasa dengan “bebasnya” bukan saja memasukkan kepentingan (politik)-nya di dunia perbankan namun juga kepentingan elit politiknya, termasuk kroni-kroninya.<sup>23)</sup>

Dominasi dan campur tangan pemerintah terhadap bekerjanya birokrasi penegakan hukum dapat kita lihat melalui berbagai kasus

meski seringkali *dibantah* oleh penguasa. Meski dalam Undang-undang no. 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain, namun kenyataan menunjukkan lain. Berbagai kasus yang ditangani oleh pengadilan baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas (Mahkamah Agung) apabila menyangkut kepentingan penguasa tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah. Beberapa kasus yang terjadi seperti kasus Marsinah, tanah Kareth Ohee, peristiwa 27 Juli 1996, Kedung Ombo, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pahlawan, majalah Tempo diindikasikan terjadinya *campur tangan* oleh penguasa.

Demikian pula dengan mencermati berbagai persoalan tentang kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh rezim Orde baru seperti terhadap kasus-kasus pencemaran, perbankan, utang luar negeri, Freeport, Pertamina dan sebagainya dengan jelas menggambarkan keterkaitan yang erat antara masalah-masalah tersebut dengan hukum yang berupa pembuatan keputusan, penggunaan dan sekaligus *penyalahgunaan hukum*, yang pada akhirnya memberikan sumbangan besar dalam keruntuhan ekonomi kita. Ini tidak bermaksud memperkecil aspek lain di luar hukum seperti tatanan politik, hankam, ekonomi, budaya dan hukum sendiri, sebab bagaimanapun juga itu merupakan habitat hukum dan karenanya wajah hukum sangat dipengaruhi oleh habitatnya artinya hukum hanya dapat dipahami dengan baik melalui konteks sosialnya, dalam arti hukum berinteraksi dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan lain seperti politik, ekonomi.

sosial dan budaya, di samping perkembangan pada dasawarsa akhir ini yang datang dari masyarakat global khususnya globalisasi ekonomi dengan ideologi **pasar bebas**<sup>24)</sup> --berbeda dengan **ekonomi pasar**-- yang lebih merupakan bentuk **kolonisasi kehidupan dunia** khususnya kolonisasi ekonomi.<sup>25)</sup> Globalisasi ekonomi bukanlah demi kepentingan umat manusia secara adil, dia mengabdikan kepada kepentingan korporasi raksasa untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Semakin besar unit ekonomi, semakin besar pemain-pemain ekonomi yang dominan, akan semakin terkonsentrasi kekuatan politik di tangan korporasi-korporasi raksasa. Semakin besar kekuatan politik korporasi dan pihak-pihak yang bersekutu dengan mereka (antara lain, pemerintah), makin lemah kekuatan politik rakyat dan makin lunturlah makna demokrasi, dengan demikian rakyat semakin tersingkir dari lingkaran pengambilan keputusan. Ironisnya proses kolonisasi ekonomi dan kehidupan justru memperoleh energi tambahan melalui hukum, seperti semakin meluasnya kekuasaan hukum Barat (Amerika) melalui IMF dan bank Dunia dan pasar terbuka (NAFTA, AFTA, WTO). Tentunya perlu dipertanyakan seberapa jauh hal ini memperhatikan tuntutan konstitusi khususnya dalam merealisasikan fungsi primer hukum yakni perlindungan masyarakat, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ilustrasi, menurut konstitusi kita, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa bukan saja tindakan-tindakan pemegang kekuasaan (pemerintah) harus didasarkan pada



hukum, namun pemerintah juga diwajibkan untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum. Dari apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, fungsi primer negara hukum adalah :

1. Perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.<sup>26)</sup>
2. Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang *kita percayai* harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
3. Pembangunan. Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan *kesejahteraan rakyat* di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai *kendaraan* baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil.<sup>27)</sup> Artinya hukum sekaligus digunakan



sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Agaknya proses *pengangkangan* oleh korporasi ini semakin nampak pada beberapa tahun terakhir dan agaknya masih akan terus berlangsung. Pertanyaannya adalah apakah proses *pengangkangan* ini dapat dipandang sebagai bentuk “pembelian” yang dilakukan oleh korporasi terhadap pemerintah negara-negara ketiga (termasuk negara kita) dan selanjutnya terhadap demokrasi di seluruh dunia.

Sehubungan dengan itu, peran media massa khususnya TV barangkali dapat dipandang sebagai institusi yang paling penting dalam proses reproduksi kultural dalam arti bukan saja untuk menjual produk dan memperkuat kultur konsumen, akan tetapi juga dalam menciptakan kultur politik dalam *menyamakan* kepentingan korporasi dengan kepentingan umat manusia **dalam benak masyarakat** yakni kultur kapitalisme konsumen. Kultur kapitalisme konsumen merupakan salah satu kultur publik yang tercipta secara tidak demokratis karena :

1. tidak dibuat oleh rakyat, melainkan oleh kelompok komersial yang bekerja sama dengan kelompok elit lain (pencari untung),
2. dalam perilakunya sehari-hari hanya mengedepankan satu visi saja tentang kehidupan yang baik dan mengesampingkan yang lain. Dengan demikian, merendahkan kehidupan masyarakat, *menghalangi* masyarakat untuk menikmati kehidupan dari

sudut pandang yang berbeda dan *mengarahkan* pada kultur tertentu.<sup>27.a)</sup>

Pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah hukum dapat melindungi kita dari kejahatan korporasi. Bagaimanapun juga hukum merupakan *kekuatan* dan *kekuasaan* yang memasuki kehidupan sosial dan sangat mempengaruhi kita. Hukum membentuk wajah kita dari kondisi-kondisi sejak lahir hingga kondisi-kondisi kita sampai mati dan segalanya diantaranya. Hukum seringkali punya pengaruh yang kontradiktif dalam hidup kita, di satu sisi dia dapat memberikan perlindungan dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan kita secara adil, namun sebaliknya hukum juga dapat mengubah hidup kita dan menciptakan penderitaan dan kecemasan khususnya bila hukum sudah terkooptasi oleh dan menjadi alat kekuasaan semata sebagaimana disebutkan di atas.<sup>28)</sup> Oleh karena itu seharusnya hukum dapat membuat hidup sedikit lebih *baik*, sedikit lebih *gampang* dan sedikit lebih *bebas* bagi **sebagian besar** orang dan sebagian besar waktu.<sup>28.a)</sup>

Pemahaman dan kebijakan secara fragmentaris atau sepotong-sepotong terhadap kejahatan korporasi justru akan menghasilkan semakin membesarnya kesenjangan sosial dan kehidupan serta meningkatkan ketidakadilan. Beberapa dapat dicontohkan antara lain pandangan yang masih banyak dianut seperti : “*illegal but not criminal*”, kecenderungan pengawasan dan penyelesaian oleh agen administrasi, kecenderungan untuk hanya mengenakan denda,

kecenderungan ke arah sekadar *mematuhi hukum* daripada *membuat jera*. Pandangan demikian akan membawa berbagai konsekuensi hukum, sosial, psikologis dan morai bagi perorangan, kelompok, maupun bagi masyarakat luas dan secara keseluruhan justru dapat merugikan usaha-usaha untuk melawan kejahatan korporasi.

Hadirin yang saya muliakan,

Uraian di atas menggambarkan berkembangbiaknya kejahatan korporasi di Indonesia terutama dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintahan Orde baru yang dilakukan secara **sistimatis** baik melalui peraturan perundangan --termasuk untuk tidak membuat peraturan yang *memerangi* kejahatan korporasi-- maupun melalui kebijakan pemerintahan sehari-hari dengan membiarkan berlangsungnya kejahatan korporasi. Di samping itu kita menyaksikan keterlibatan elit politik dan birokrasi baik secara perorangan maupun kelompok namun tidak dilakukan penindakan atau pertanggungjawaban hukumnya.<sup>29)</sup>

Sehubungan dengan itu perlu upaya sistimatis dalam melawan kejahatan korporasi. Tanpa bermaksud untuk memasuki pembicaraan mengenai kebijakan dalam menanggulangi kejahatan korporasi paling tidak dua hal dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan korporasi :

**Pertama** adalah persoalan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat luas --termasuk penegak hukum-- kurang

mengetahui tentang kejahatan korporasi bahkan ketidaktahuan dan karenanya juga ketidakpeduliannya terhadap kejahatan korporasi sangat mencemaskan. Kondisi demikian tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rezim Orde Baru dalam melindungi kejahatan korporasi dan dalam proses *pemerdayaan*, *pembodohan*, dan *ketidakberdayaan* masyarakat terhadap kejahatan korporasi sehingga persoalan pencerahan terhadap proses konstruksi sosial terhadap realitas dan pencerdasan bangsa --dan karenanya juga reformasi mental dalam arti reformasi dalam cara berfikir kita yang bersifat proaktif dan independen-- merupakan hal yang sangat mendasar. Yang **kedua**, eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan di atas mensyaratkan reformasi total baik terhadap lembaga dan pranata hukum melalui perubahan paradigma hukum yang berkedaulatan rakyat --Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai paradigma moralitas atau akal budi-- maupun reformasi total di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan saja itu sebagai habitat hukum akan tetapi juga aspek-aspek tersebut saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, dan bersinergi.

Hadirin yang saya muliakan,

Sampailah saya pada akhir pidato saya. Keterpurukan kita dewasa ini nampaknya merupakan bagian dari sejarah umat manusia



tentang perebutan kekuasaan dalam berbagai dimensi. Salah satunya adalah kurang arifnya kita dalam berbagi kekuasaan atau berdemokrasi. Keserakahan dan arogansi kekuasaan nampaknya sangat mendominasi kehidupan kita. Demokrasi yang intinya *membagi* kekuasaan seharusnya merupakan bagian penting dari upaya untuk membagi **tanggung jawab**, sehingga demokrasi seharusnya merupakan proses membagi dan mewujudkan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Ini berarti bahwa kehidupan demokrasi adalah bagian dari membangun manusia-manusia, institusi-institusi, kelompok-kelompok yang bersifat otonom dan mandiri, sebab hanya dengan menjadikan mereka mandiri maka kita bisa berbicara tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan karenanya mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya.

Pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah selama ini Orde baru telah menghasilkan orang-orang, kalangan elit dan kelas menengah yang betul-betul mandiri atautkah sesungguhnya menjadikan mereka adalah *parasit* dan subordinasi dari kekuasaan penguasa --yang selalu minta *petunjuk*-- dan karenanya cenderung untuk selalu menundukkan diri terhadap kekuasaan yang ada.

Pertanyaan ini juga ingin saya sampaikan kepada anggota sivitas akademika yang saya hormati dan saya cintai dalam menyikapi kekuasaan yang ada. Universitas sebagai *pusat* kekuasaan masyarakat modern (dan postmo) karenanya juga menjadi medan perebutan opini publik yang merupakan hakekat mimbar demokrasi dan pusat kebudayaan yang ikut menghasilkan **orang ahli dengan segala**



**otoritasnya.** Oleh karenanya ijinilah saya pada kesempatan ini mengajak segenap sivitas akademika untuk berkontemplasi : kepada siapa, untuk (kepentingan) siapa, tentang apa, dan untuk apa selama ini kita berbicara ?

Para mahasiswa yang saya cintai,

Izinkanlah pada kesempatan ini saya minta maaf atas keterbatasan pengetahuan dan visi saya dalam menangkap perkembangan dunia, kurang daya kritis saya dalam menerjemahkan tuntutan yang mendasar dalam proses pendidikan khususnya dalam menyumbang proses pembentukan insan yang mandiri, bertanggung jawab dan berakal budi. Permintaan saya kepada saudara-saudara adalah kembangkanlah terus visi dan sikap kritis saudara-saudara sekalian untuk selalu bertanya dan mempertanyakan realitas yang ada di segala aspek kehidupan, sebab bila saudara lalai, kurang waspada, dan tidak peduli, maka saudara-saudara dan sekalian anak bangsa akan *ditelan* oleh mereka yang rakus dan haus kekuasaan. Pada kesempatan ini ingin saya ingatkan-pesan Einstein tentang hakekat nilai dan ilmu : “adalah tidak cukup bahwa kamu memahami ilmu agar pekerjaanmu akan meningkatkan berkah bagi manusia. Perhatian kepada **manusia itu sendiri dan nasibnya** harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis, perhatian kepada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan”.<sup>30)</sup>

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Untuk mengakhiri pidato ini izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sejawat di fakultas. Bapak Dekan dan segenap pimpinan fakultas, para anggota senat Universitas, Bapak Rektor dan segenap pimpinan Universitas, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta fihak-fihak yang telah membantu proses diangkatnya hingga pelaksanaan penyampaian pidato pengukuhan sebagai guru besar madya.

Pernyataan terima kasih ini juga ingin saya sampaikan kepada guru-guru saya sejak di S.D, SMP, SMA, dosen-dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepada mas Han Bing Hoo, mas Paul Mudikdo, pak Sudarto dan pak Satjipto sebagai guru-guru saya, sebagai kakak-kakak saya, dan sebagai sahabat-sahabat yang memberikan kehangatan dan kesan yang sangat dalam di dalam hidup saya, khususnya dalam mendorong, membangkitkan inspirasi, serta dalam memperkaya jiwa saya dengan nilai-nilai keutamaan, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Secara lebih khusus lagi ucapan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Prof. Satjipto Rahardjo, sekaligus sebagai teman sejawat yang pada saat saya kehilangan gairah untuk menjadi guru besar, melalui tindakan nyata telah membangkitkan kembali semangat saya. Izinkanlah saya menyampaikan nasehat beliau yang tidak akan pernah saya lupakan sebagai berikut : "Tulisan terbaik saya adalah yang masih berada di kepala saya". Nasehat tersebut telah berhasil mengalahkan berbagai

perasaan seperti arogansi dan rendah diri, *ketakutan* dan kelemahan saya dalam menulis, akan tetapi juga sekaligus membangkitkan semangat untuk mengisi kepala saya dengan membaca, dan terus membaca, belajar, dan terus belajar.

Ucapan yang tulus dari lubuk hati dan sanubari yang paling dalam saya sampaikan kepada Ibu saya yang tercinta, Ibu Asiyah Warmidhi Martoprayitno yang selalu menjaga dan tidak pernah berhenti dalam memberi nasehat kepada saya meski anaknya sudah menjadi barisan manula, dan kepada Bapak saya almarhum Warmidhi Martoprayitno yang menyaksikan peristiwa ini *dari sana*, terimalah terimakasih ananda atas tuntunan dan bimbingan. Kepada isteri saya Niel Susanto, anak-anak saya Vembri, Hani dan Diah terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan dan pengorbanan yang kalian berikan.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai akhir kata terimalah ucapan terima kasih saya kepada para hadirin semua atas kesediaan menghadiri, dan mendengarkan pidato pengukuhan ini.

Dengan ini pula saya menerima jabatan sebagai guru besar, semoga dengan doa saudara-saudara sekalian saya dapat senantiasa berjalan di jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh-Nya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

## Catatan Kaki

- 1). Selama ini kita (baca : dibawah pemerintahan Orde baru) mengalami kemerosotan moral politik yang teramat parah yang ditunjukkan oleh tingkah laku para pemimpin, pejabat dan elit politik yang secara vulgar dan terbuka melakukan penyimpangan-penyimpangan dan berlangsung terus menerus. Setiap kali masyarakat dikagetkan oleh tindak *penyimpangan* baru (*skandal*) dan karena berlangsung terus menerus lalu diterima sebagai sesuatu hal yang biasa. Kondisi seperti itu dinamakan *the false sense of normalcy*, seperti penanganan masalah politik yang tidak jujur, tidak sportif, tidak demokratis, termasuk dalam rekrutmen politik yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat, yang prosesnya lebih banyak didasari oleh praktek-praktek KKN.
- 1.a). Penyebutan tindakan korporasi yang merugikan sebagai kejahatan oleh E. Sutherland dalam ceramahnya tentang "*white-collar criminality*" dihadapan *The American Sociological Society* pada tahun 1939 (C.B. Vedder *et.al*, ed. *Criminology a Book of Readings*. New York : The Dryden Press, 1955 h. 405-417) mendapat kritik yang cukup keras dari rekan-rekan seprofesinya pada masa itu antara lain Paul W. Tapan , *Who is the Criminal* (Ibid. h. 39-48). Namun pada masa kini pandangan Sutherland tersebut justru dipandang sebagai karya yang sangat monumental khususnya dalam *membuka* wacana kriminologi.
- 2). 25 tahun yang lalu Prof. Sudarto, SH. Dalam acara pidato pengukuhan jabatan sebagai guru besar tetap dalam hukum pidana pada Universitas Diponegoro tanggal 21 Desember 1974 masih mempertanyakan pertanggungjawaban terhadap perserikatan (baca : korporasi) khususnya dengan melihat praktek penegakan tindak pidana ekonomi terhadap korporasi selama hampir 20 tahun. (lihat Sudarto, *Suatu Dilema Dalam*



- 3). M.B. Clinard & P.C. Yeager. *Corporate Crime*. New York : Free Press. 1980 h. 22.
- 4). Disamping pengaruh globalisasi nampaknya kebijakan swastanisasi rezim Orde Baru dan penggerogotan terhadap BUMN melalui kebijakan-kebijakan yang berbau KKN menjadikan semakin tergesernya badan-badan usaha milik negara seperti yang kita lihat antara lain terhadap Pertamina dan PLN; Lihat antara lain **Kontan**, *Inilah jurus-jurus canggih ber-KKN di Pertamina*, no. 2 th. III, 5 Oktober 1998. **Kompas**, *Kekuasaan Presiden di Pertamina, sangat mutlak*, tanggal 24 Juli 1999. **Forum**, *PLN nyaris bangkrut*, no.19 tahun IV 29 Desember 1997.
- 5). Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan cara paling besar dalam meningkatkan produk nasional bruto (PNB) dipandang sebagai kunci untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting termasuk untuk mengurangi kemiskinan. Namun di sisi lain menimbulkan berbagai kritik antara lain bahwa pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan kesenjangan sosial, sebab orang diperlakukan hanya sebagai **sarana** atau **alat** untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini bisa dilihat di negara kita -- khususnya pada masa Orde Baru-- dimana kebijakan pembangunan tersebut cenderung menciptakan *pulau-pulau kemakmuran* yang berupa *kelompok-kelompok orang kaya* di tengah-tengah samudra kemiskinan dan tersebar di sekitar kita seperti di lingkungan kerja, pemukiman, kota, wilayah, kepulauan dan dalam negara. Kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dapat dibaca pada buku *When Corporations Rule the World* karya David C. Korten (1996).



- 6). Kelompok pelaku ekonomi yang perkembangannya begitu cepat karena didukung oleh sekian banyak kemudahan ini oleh Yosihara Kunio disebut sebagai *Kapitalis Semu*.
- 7). Menurut laporan Bank Dunia tahun 1995 tentang ekonomi Indonesia, semen dikuasai Indocemen dan dua BUMN, lembaran kaca 70 % oleh Asahi Mas, tepung terigu 85 % oleh Bogasari, kertas 83 % oleh Aspex paper, mie instan 80-95 % oleh Indofood. (lihat antara lain **Prospek** no. 16 th. V, 28 Januari 95, **Kompas**, 23 Agustus 1997). Keadaan demikian jelas melanggar konstitusi dan GBHN. Misalnya dalam GBHN tahun 1993 dinyatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi Pancasila harus dihindari persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- 8). Lihat misalnya Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang penguasa (baca: pemerintah) untuk *mengobok-obok* dunia perbankan, sehingga juga peluang dalam terjadinya KKN. Keppres no. 42/1996 tentang kebijakan mobil nasional yang sangat **diskriminatif** dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada PT. Timor Putra Nasional yang adalah perusahaan milik Hutomo Mandala Putra yang tidak lain adalah putera (mantan) presiden Soeharto. S.K. Menteri Perdagangan no. 125. KP/V/1999, tanggal 15 Mei 1991 tentang BPPC. Menurut MTI dalam penelitiannya terhadap Keppres yang dikeluarkan pemerintahan Soeharto dalam kurun waktu 1993-1998 paling tidak 79 dianggap *menyimpang* baik secara legalitas, materi maupun dampaknya bagi masyarakat luas. Keppres-keppres tersebut dijadikan alat legitimasi dalam penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penyelewengan tersebut terlindungi secara legal (lihat **Kompas**, 17 Oktober 1998)

- 8.a) Misalnya alat-alat KB seperti IUD, pil KB dan kondom yang merupakan produk korporasi dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi suami-isteri dan orang-orang dewasa.
- 9). E.H. Sutherland, *op.cit.* Jauh sebelumnya Ed. Ross (1870) sudah minta perhatian terhadap fenomena *criminaloid* ( baca: pelaku kejahatan *white-collar*). ( Lihat G.Geis & R.F. Meier. ed. *White-Collar Crime*. New York: The Free Press, h. 29-37).
- 10). Lihat antara lain I.S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial tentang Realitas Kejahatan*, Semarang, 1990 (disertasi:unpublished), "*The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*" dalam **Australian Institute of Criminology**, Canberra, ACT: 1992 no.12 h. 41-46. juga *Kejahatan Korporasi*, Semarang : B.P. UNDIP, Semarang, 1995. Dr. J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, 1994 , Muladi & Dwidjo Priyatno, **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**. Bandung: Bagian Penerbitan STHB, 1991. Mardjono Reksodiputro. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya". Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK, Jakarta, 17 Juni 1993.
- 11). Beberapa penelitian antara lain I.S. Susanto. "Studi Sosiologis mengenai bekerjanya Hukum dari Lembaga Pengawasan Produk Makanan dan Kosmetika" dalam **Masalah-masalah Hukum**, no. 9 th.1993.  
Kuat Puji Prayitno, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebagai Upaya Melindungi Kepentingan Konsumen". (Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1996). R.B. Sularto, "Persepsi Masyarakat tentang Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Obat & Makanan". (Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1997).

- 12). Lihat antara lain **Kontan**, no.2 th. III, 5 Oktober 1998, "Timor menjebol BBD". "Melacak Catatan Bob Hasan" no. 17, th. III, 18 Januari 1999, "Inilah sang Penggerogot Bank", **Kompas**, 5 Juli 1999, "Sebagian Besar Debitor BPPN lakukan "mark up". **Kompas**, 15 Oktober 1998 "*Cerita Baru dari Kasus KKN PT Freeport Indonesia*", **Kompas**, 13 Juni 1997, "Menhut: PTTG Perambah Hutan Paling Berani". **Kompas**, 24 Juni 1998, "Soal 'Insider Trading' Perampokan di Pasar Modal". **Kompas**, 14 Nopember 1995, "3.000 KK Merasa Diteror untuk Pembebasan Tanah". **Kompas**, 3 April 1998, "65 Persen Kebakaran Hutan Kalimantan Timur karena HTI". **Kontan**, no. 3 th III, 12 Oktober 1998 "Memperebutkan Duit Buruh", **Warta Ekonomi** no. 25 th. II, 7 Mei 1990, "Upah Buruh Kita Terendah di Asia".
- 12.a) **Kontan**, no. 2 tahun III, 5 Oktober 1998 "Kalau Mau Seluruh Republik Harus Dibongkar". Lihat juga **Kompas**, tanggal 23 September 1999, "Para Pejabat Ikut Menikmati Balongan": untuk membongkar kasus *mark up* atas kilang minyak Exor I Balongan diperlukan sebuah tindakan radikal, sebab melibatkan banyak pihak yang terkait dengan proyek tersebut, baik di Pertamina maupun di kalangan Pemerintahan, yang juga mengecap dan menikmati hasilnya.
- 13). Istilah populer bagi tindakan *negatif* yang dilakukan aparat dianggap sebagai tindakan *oknum*. Namun perlu dipertanyakan apakah tindakan tersebut sungguh-sungguh bersifat perorangan ataukah sebenarnya tindakan tersebut merupakan *warna* kebijakan dari organisasi/birokrasi yang bersangkutan, sehingga istilah "oknum" tidak lain hanyalah bagian dari *budaya* "kambing hitam" yang sangat dominan pada rezim Orde baru dan sekaligus sebagai bagian upaya untuk melindungi penguasa --khususnya pimpinan-- dan sistem yang ada yang dikonstruksikan sebagai *selalu benar*. Secara lebih mendasar hal ini sebenarnya berkaitan dengan persoalan akuntabilitas yang nyaris tidak dikenal dalam rezim Orde Baru, ataupun

kalaupun dilakukan hanyalah sekedar formalitas belaka atau karena adanya kepentingan-kepentingan (politik). Bandingkan dengan apa yang disebut sebagai “Pertanggungjawaban Presiden” yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto di hadapan DPR/MPR, yang sekedar formalitas sehingga selalu diterima dan di **setuju-i**.

- 14). Didik J. Rachbini menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru sejak kelahirannya telah menerapkan sistem ekonomi politiknya yang dijangkiti penyakit “kembar siam”, yang menggambarkan eksistensi dua institusi yang berbeda secara mendasar --yakni negara dan swasta-- yang terjebak ke dalam hubungan kronis yang buruk dan kolusif. (Forum, no. 22, th. VI, 9 Feb: 1998)
- 14.a) C.Geertz, Menamakan negara macam ini sebagai *power house state* (“negara pejabat”) dimana para pejabat pimpinan cenderung jadi *master* (tuan) dan bukan manajer.
- 14.b) Berita di berbagai media massa menggambarkan ribuan balita yang menderita berbagai penyakit kurang gizi selama masa krisis ekonomi ini.
- 15). J.H. Reiman,; *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*. New York: John Wiley & Sons, 1979 h. 63 dst.
- 16). Ibid.
- 17). I.S. Susanto, (1992), *loc.cit.* h. 44.
- 18). **Suara Merdeka**, *Kebakaran Hutan 1997 Akibat Kemarau atau Dosa Pelaku Bisnis ?*, tanggal 25 September 1997.
- 19). **Kompas**, 13 Juli 1998.
- 20). I.S. Susanto, (1995). *op.cit.* h. 24.



- 20.a) Status BI sebagai Bank Sentral tidak mandiri karena hanya membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan perluasan kesempatan kerja (Lihat UU no. 13/68). Pemerintahan Orde baru terlalu banyak campur tangan dalam kebijakan BI misalnya: intervensi pemerintah terhadap batas maksimal pemberian kredit antara lain melalui rekomendasi dari elit penguasa.
- 20.b) Korporasi yang tujuan utamanya mencari untung dan cenderung untuk menjadi lebih besar, seringkali mengabaikan kepentingan pihak ketiga termasuk untuk melanggar hukum. Di sisi lain praktek penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi hampir tidak dilakukan, sehingga pelanggaran hukum hanya dipandang sekedar *ongkos* atau biaya yang dikeluarkan sebagai pengurangan dari keuntungan. Di samping itu menurut S. Box paling tidak terdapat lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya yaitu persaingan, pemerintah, karyawan, konsumen dan publik, sehingga dapat menghasilkan tekanan bagi korporasi untuk melakukan kejahatan. (Lihat S. Box, *Power, Crime and Mystification*, London: Tavistock, 1993 h.35 dst.)
- 20.c) *Ibid.* h.33.
- 20.d) Kebijakan rezim Orde Baru yang melindungi kejahatan korporasi secara sistematis telah membawa pemerintahannya semakin represif dan semakin tidak demokratis. Berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka di negara yang merdeka seperti hak-hak demokrasi, HAM dan sebagainya *selalu* dihadapi dengan pendekatan kekuasaan dan militer seperti kasus Tanjungpriok, Aceh, Irian, Timor Timur, Peristiwa 27 Juli 1996, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I dan masih berlanjut dan dilanjutkan oleh pemerintahan Habibie seperti tragedi Semanggi II dan dalam cara menangani kasus-kasus unjuk rasa di seluruh



pelosok tanah air di tambah dengan cara-cara yang *lebih halus* namun tidak kalah tidak demokratisnya seperti dalam menangani masalah yang ada seperti rekapitulasi perbankan yang bernilai di atas seratus triliun rupiah, *issues* tentang *money politics*, JPS dan KKN.

- 20.e) I.S. Susanto. *op.cit.* h.25. Bandingkan juga dengan kasus *suap* oleh perusahaan pesawat terbang Lockheed Corporation yang memberikan pembayaran kepada pejabat-pejabat di beberapa negara antara lain kepada pangeran Bernard, suami ratu Juliana dari Belanda, menteri pertahanan Turki, perdana menteri Tanaka dari Jepang pada tahun 1970-an (Lihat J.M. Johnson & D.J. Douglas, *e.d. Crime on The Top : Deviance on Business and The Professions*, Philadelphia: Lippincott, 1978 h.196 dst.  
Bandingkan juga kasus rebutan komisi antara Pertamina dengan janda A.M. Taher (mantan pejabat Pertamina) di Pengadilan Singapore beberapa tahun yang lalu.
- 20.f) Bandingkan dengan kasus perusahaan pertambangan minyak AS, Triton Energy yang didenda US \$ 300.000 oleh SEC, di samping juga kepada beberapa staf senior dan dirutnya yang dinilai lalai mencegah penyuaipan kepada **pejabat Indonesia** untuk memanipulasi pajak dan menutupi pembayaran pajak dan operasi minyaknya di Sumatera (**Kontan**, tanggal 13 Maret 1997) akan tetapi di Indonesia sendiri kasus tersebut tidak diambil tindakan.
- 21). J. Braithwaite, "*Transnasional corporations and corruption : toward some international solutions*". **International journal of sociology and law**, 1979: 7 h. 125-142.
- 22). W.J. Chambliss, *On the Take From Petty Crooks to Presidents*, Indiana University Press, 1978 h. 179-181.

- 23). Ketika kebijakan tersebut menghasilkan kemerosotan dan tanda-tanda kehancuran dunia perbankan nasional, usaha-usaha "penyelamatan" antara lain melalui PP. no. 68/1996 tentang ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuiditas Bank sudah terlambat, sehingga terjadilah tragedi nasional dalam perbankan kita.
- 24). Globalisasi ekonomi ini *dipacu* dengan perubahan kekuatan dan strategi di dalam ekonomi yang saling mengait sehingga menghasilkan kecenderungan apa yang oleh Kenichi Ohmae disebut dengan *borderless world* sebagai berkembangnya strategi ekonomi yakni *customer, competitor, company, country* dan *currency* serta pergerakan yang cepat dari 4 "I's" yakni *investment, industry, information technology*, dan *individual consumers* (lihat Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, 1991 h. 2 dst dan *The End of The Nation State*, *The Free Press* 1995 h. 2-5).
- 25). David C. Korten, *op.cit.*
- 26). Konggres ke-5 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pelanggaran Hukum" yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, dan terhadap "penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum" (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.

- 27). Nampaknya rezim Orde Baru yang menganggap dirinya sebagai *Orde Pembangunan* telah ingkar janji dalam memenuhi fungsinya sebagai negara hukum, bahkan dapat dipandang telah meninggalkan hukum. Akibatnya bukan kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat banyak, melainkan kemiskinan, disintegrasi sosial, kerusakan lingkungan dan kerusakan nilai-nilai dan moralitas masyarakat.

Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca pemerintahan Suharto yang berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM seperti *dukun santet*, *ninja*, Aceh, Ambon, Timor-Timur, cara-cara aparat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan warga masyarakat pada umumnya; penanganan terhadap dugaan KKN seperti kasus Jaksa Agung Andi Ghalib, JPS, *money politics*, skandal Bank Bali dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, di berbagai aspek kehidupan menggambarkan semakin jauh dari tuntutan reformasi. Sehingga pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah Presiden Habibie menyadari dan memahami makna reformasi ketika menamakan pemerintahannya sebagai kabinet **Reformasi** Pembangunan.

- 27.a) Korten, *o.p. cit.* h. 229-230

- 28). Lihat Gerald Turkel, *Law and Society. Critical Approaches*, Allyn and Bacon, 1996, h. 1-dst. Menurut Kuntowijoyo, perilaku birokrasi demikian menggambarkan birokrasi yang *ambaudenda*, yang serba kuasa, dan sebagai negara demokrasi seharusnya bersifat *ambaureksa*, yang melindungi. (lihat Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994).

- 28.a) Selama rezim Orde Baru, hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga tidak lagi mampu menjaga dan melindungi rakyat banyak. bahkan cenderung menjadi *monster* bagi masyarakat dan karenanya ikut

melahirkan monster-monster lain untuk bersama-sama akan *mengangangi* masyarakat. Dengan demikian hukum sekaligus juga menjadi alat teror (teror hukum). Lihat misalnya undang-undang subversi, pasal-pasal tentang *haatzaai* dan makar dalam KUHP.

- 29). Dionysion Spinelli menyebut tindakan para alat politik sebagai "*Top hat crimes*". Di beberapa negara terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan penuntutan yang **bervariasi** : dari *hightreason, violation of the Constitution, political assassinations or other forms of homicide, kidnapping, abuse of power, illegal wiretapping, political espionage or unlawful arrests, to economic scandals, embezzlement of public money, abuse of insider information, bribery etc, (The Dionysior Spinellis. "Crimes of Politicians in Office (or "Top hat crimes")"* dalam Helmut EPP.ed. *Crime by Government. (Round Table XVth International Congress of Penal Law, Rio de Janeiro. 4-10 September 1994.h.17-38).*
- 30). Jujun S. Suriasumantri. *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1978.